



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN III



2021

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
------------	-----

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang	I-1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	I-1
C. Sumber Daya Manusia	I-4
D. Kewenangan, Isu Strategis dan Permasalahan	I-4
E. Sistematika Laporan	I-6
F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	I-7
G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	I-9

Bab II Capaian Kinerja Triwulanan

A. Tahapan Pengukuran Kinerja	II-1
B. Capaian Kinerja Organisasi	II-3

Bab III Penutup

A. Penutup	III-1
------------	-------

Daftar Lampiran

- Lampiran 1.** Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021
- Lampiran 2.** Revisi Perjanjian Kinerja 2021
- Lampiran 3.** Revisi Rencana Aksi 2021

Kata Pengantar

Sebagai institusi publik, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2021 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2021.

Diharapkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 9 September 2021

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



Ir. M. Popik Montanasyah, M.T.
NIP. 19630910 199203 1 003

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga untuk mendukung agar tercapai prinsip *Good Governance* itu, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan memerlukan adanya Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

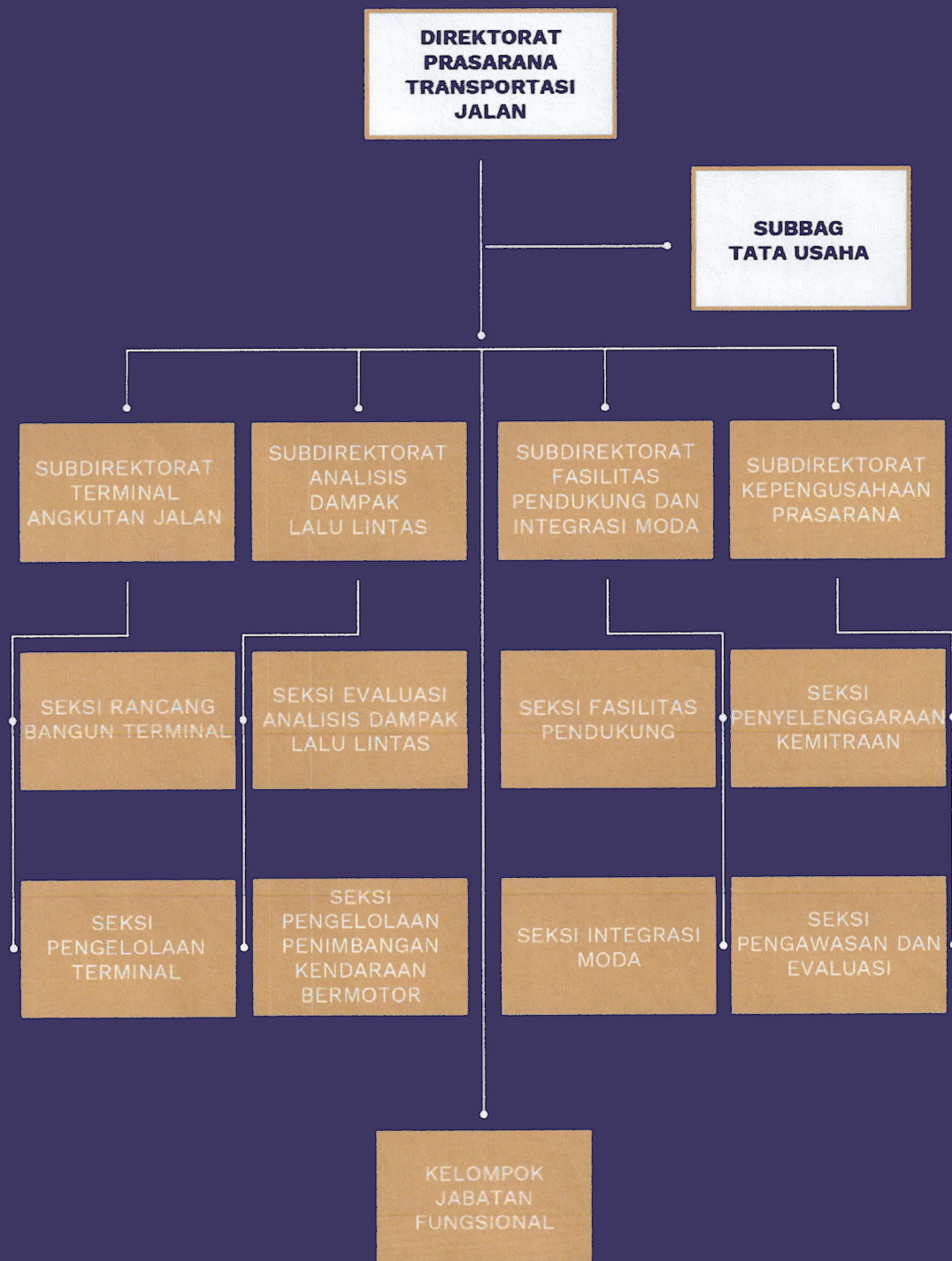
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;

3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan;
2. Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;
4. Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana; dan
5. Sub Bagian Tata Usaha.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



C. Sumber Daya Manusia

Pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan posisi tahun 2021 diklasifikasikan menurut sub unit kerja, golongan, pendidikan umum dan jenis kelamin sebanyak 82 orang pegawai, Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1. Pegawai Berdasarkan Sub Unit Kerja

NO.	SUB UNIT KERJA	PNS	CPNS	PPNPN	JUMLAH
1.	Sub Bagian Tata Usaha	6	-	8	13
2.	Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan	12	2	6	20
3.	Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	11	1	5	17
4.	Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	11	-	6	17
5.	Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana	10	1	3	14
Jumlah		50	4	28	82

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan –
2021

D. Kewenangan, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a. Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- b. Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai target, sasaran dan tujuan organisasi, perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya, meliputi ketersediaan SDM yang ideal sesuai dengan beban kerja yang ada pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

3. Anggaran

Dalam rangka mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional maka *refocusing* dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga perlu dilakukan. *Refocusing* dan realokasi belanja Triwulan III yang dilakukan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan total anggaran semula sebesar Rp. 194.547.131.000,- menjadi Rp. 194.091.317.000,-.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Triwulan I Tahun 2021 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Kegiatan
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

E. Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi Unit Kerja
- C. Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- E. Sistematika Laporan
- F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- G. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

- A. Tahapan Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan dan Saran

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021
- Lampiran 2. Revisi Perjanjian Kinerja 2021
- Lampiran 3. Revisi Rencana Aksi 2021

F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperhatikan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja dan sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2021
1	SP1 Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKP 1 Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,71
		IKP 2 Rasio konektivitas transportasi Perkotaan	Rasio	0,455
2	SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	IKP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	%	83
		IKP 4 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1
		IKP 5 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55
3	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 6 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,019
		IKP 7 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,086

Arah Kebijakan dan Strategi Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2021

Berdasarkan Tujuan Kementerian Perhubungan, perlu disusun Tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan per 10.000 keberangkatan.

Berdasarkan tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di atas, dalam mengukur keberhasilan tujuan ditetapkan Indikator Tujuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 yang bersifat outcome yaitu : (1) Meningkatnya konektivitas pelayanan transportasi darat dengan satuan rasio; (2) Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks; (3) Menurunnya tingkat pelanggaran kendaraan angkutan barang pada UPPKB.

Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2020-2024, arah kebijakan berisi satu atau beberapa program/kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan strategi berisi indikasi kegiatan strategis sebagai implementasi dari arah kebijakan yang ditetapkan

Pada bagian ini disampaikan rumusan tentang Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi untuk mencapai Sasaran Program Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah dijelaskan dalam Sub Bab 2.3.2. secara umum arah kebijakan yang akan ditempuh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terdiri dari:

(GA) Program Infrastruktur Konektivitas

- SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi
- SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat
- SK.4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat
- SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

(WA) Program Dukungan Manajemen

SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Setiap arah kebijakan dijabarkan menjadi strategi implementasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan strategis/project.

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan kontrak kinerja antara Direktur Prasarana Transportasi Jalan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2021 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen dengan Total Anggaran Rp. 194.091.317.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET 2021
SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	-	0,61
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	99	104
		IKK 3	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	-	8

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET 2021
SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	Indeks (%)		80,0
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Rasio (%)	53,54	53,60
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	Rasio (%)	70,17	71,03
SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	Rasio (%)	65,0	35
SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	-	86
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	-	71

Bab II

Capaian Kinerja Triwulanan

A. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal. Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing. Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

2. Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

3. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Target kinerja Program Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Jalan diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari setiap Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP) dan dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK).

Secara lebih detail rincian target kinerja serta kebutuhan pendanaan disampaikan. Dalam rangka akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang transportasi Jalan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Prasarana Transportasi Jalan, maka dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran (melalui indikator kinerjanya) pada setiap tahun anggaran.

Oleh karena itu, capaian kinerja setiap indikator kinerja harus diukur dan dilaporkan dalam dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan untuk setiap tahun anggaran, antara tahun 2020-2024. Sedangkan untuk pelaporan secara berkala setiap bulannya, dilaporkan melalui aplikasi *e-performance*.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Prasarana Transportasi Jalan untuk jajaran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Selain itu, pengukuran dan pelaporan juga digunakan sebagai alat evaluasi tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya secara lebih cepat dan akurat.

Berikut adalah Indikator Kinerja Kegiatan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 – 2024 :

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			SATUAN		TARGET		TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
SK1	Meningkatnya Konktivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar moda Transportasi														
IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,61	W	100%	0,61	0,61	100%	0,61	0,61	100%				
IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	104	104	100%	104	104	100%	104	104	100%				
IKK 3	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	Lokasi	8	6	75%	8	6	75%	8	6	75%				
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat														
IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	80,0	83,34	104,18%	80,0	88,22	110,28%	80,0	89,17	111,46%				
IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,60	55,72	103,96%	53,60	55,72	103,96%	53,60	55,72	103,96%				
IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	71,03	71,78	101,06%	71,03	71,78	101,06%	71,03	71,78	101,06%				
SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat														
IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	35	44	74,29%	35	51	54,29%	35	50	57,14%				
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat														
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	86	75,33	87,59%	86	78,64	91,44%	86	83,84	97,49%				
SK1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik														
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	71	71	100%	71	71	100%	71	71	100%				
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan															
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan															
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)															
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)															

Jika dilihat lebih detail, sampai dengan triwulan II Tahun 2021, berdasarkan revisi perjanjian kinerja dari 9 IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 6 (enam) IKK berstatus hijau dan 3 (tiga) IKK berstatus merah

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan triwulan III tahun 2021 sebesar 0,61 jika dibandingkan dengan target PK triwulan III tahun 2021 sebesar 0,61 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Darat.



Grafik Capaian IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan.

Sumber: Data Olahan

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, terdapat sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Umum dan Fasilitas Prasarana Jalan serta Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penyeberangan. Dari total Kawasan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melayani 83 Kawasan Strategis Nasional.

Rasio Kawasan Strategis Nasional (KSN)* yang telah terlayani simpul prasarana transportasi jalan merupakan perbandingan jumlah KSN prioritas yang telah terlayani prasarana transportasi jalan terhadap jumlah KSN prioritas.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk diakomodir akan dilayani prasarana transportasi jalan dan meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN. Adapun daftar Kawasan prioritas dimaksud adalah sebagai berikut terdiri dari:

10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

1. KSPN Danau Toba;
2. KSPN Bangka Belitung;
3. KSPN Borobudur;
4. KSPN Bromo Tengger Semeru;
5. KSPN Mandalika;

6. KSPN Labuan Bajo;
7. KSPN Likupang;
8. KSPN Wakatobi;
9. KSPN Morotai;
10. KSPN Raja Ampat.

9 Kawasan Industri (KI)

1. KI Sei Mangkei;
2. KI Galang Batang;
3. KI Bintan Aerospace;
4. KI Sadai;
5. KI Ketapang
6. KI Surya Borneo;
7. KI Palu;
8. KI Teluk Weda;
9. KI Teluk Bintuni

8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1. KPBPB Sabang;
2. KEK Arun Lhokseumawe;
3. KPBPB Batam Bintan Karimun;
4. KEK Tanjung Lesung;
5. KEK Mandalika*;
6. KEK MBTK;
7. KEK Bitung;
8. KEK Morotai;

42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional:

1. Banda Aceh;
2. Mebidangro;
3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
4. Pekanbaru;
5. Dumai;
6. Batam;
7. Jambi;
8. Palembang dsk;
9. Bengkulu;
10. Pangkal Pinang;

11. Bandar Lampung;
12. Jabodetabek;
13. Serang;
14. Cilegon;
15. Bandung Raya;
16. Cirebon;
17. Surakarta;
18. Kedungsepur;
19. Cilacap;
20. Yogyakarta;
21. Gerbangkertosusilo;
22. Malang;
23. Sarbagita;
24. Mataram Raya;
25. Kupang;
26. Pontianak;
27. Palangkaraya;
28. Banjarmasin dsk;
29. Balikpapan-Samarinda-Bontang;
30. Tarakan;
31. Gorontalo;
32. Manado;
33. Bitung;
34. Palu;
35. Maminasata;
36. Kendari;
37. Ambon;
38. Ternate;
39. Sorong;
40. Timika;
41. Jayapura;
42. Merauke.

Sehingga:

$$\text{Capaian Rasio Konektivitas} = \frac{42 \text{ wilayah (irisan simpul TTA \& faspim yang terlayani)}}{69 \text{ wilayah KSN}} = 0,61$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan Triwulan III Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,61}{0,61} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang dapat mendukung tercapainya kinerja kegiatan ini yaitu Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan dengan Pagu Anggaran sebesar RP. 380.000.000,- dan realisasi keuangan per Triwulan III sebesar 350.493.102,- (92,24%).

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu melakukan percepatan kegiatan pembangunan pada simpul-simpul prasarana transportasi jalan;

IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada triwulan III tahun 2021 sebesar 104 lokasi, jika dibandingkan dengan target PK triwulan III tahun 2021 sebesar 104 maka capaian kinerja mencapai 100%.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa antara target dengan realisasi masih sama, karena belum ada penambahan lokasi pengoperasian Terminal Tipe A dan Terminal Barang. Kegiatan tersebut diakomodir oleh kegiatan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A.

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan data Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada target renstra tahun 2021, terdapat 104 lokasi terminal yang beroperasi dimana target tersebut sebenarnya telah terpenuhi pada tahun 2020, sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 telah sesuai dengan target renstra dan target PK Tahun 2021.

Berikut ini adalah daftar Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi berdasarkan target PK pada Tahun 2021 dan hasil dari kegiatan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A:

1. Terminal Langsa
2. Terminal Lhokseumawe
3. Terminal Meulaboh
4. Terminal Batoh
5. Terminal Paya Ilang

6. Terminal Tanjung Pinggir
7. Terminal Madya Tarutung
8. Terminal Sibolga
9. Terminal Amplas
10. Terminal Pinang Baris
11. Terminal Anak Air
12. Terminal Kiliran Jao
13. Terminal Bareh Solok
14. Terminal Simpang Aur
15. Terminal Jati Pariaman
16. Terminal Bangkinang
17. Terminal Payung Sekaki
18. Terminal Dumai
19. Terminal Alam Barajo
20. Terminal Muara Bungo
21. Terminal Pulau Tujuh Bangko
22. Terminal Sribulan
23. Terminal Alang-Alang Lebar
24. Terminal Kayuagung
25. Terminal Batu Kuning
26. Terminal Betung
27. Terminal Karya Jaya
28. Terminal Simpang Periuk
29. Terminal Batay
30. Terminal Simpang Nangka
31. Terminal Rajabasa
32. Terminal Pakupatan
33. Terminal Labuan
34. Terminal Mandala Lebak
35. Terminal Merak
36. Terminal KH. Ahmad Sanusi
37. Terminal Ciakar
38. Terminal Guntur Melati Garut
39. Terminal Harjamukti
40. Terminal Indihiang
41. Terminal Kertawangunan
42. Terminal Subang
43. Terminal Banjar

44. Terminal Cikampek
45. Terminal Leuwipanjang
46. Terminal Purworejo
47. Terminal Cepu
48. Terminal Bangga Mbangun Desa
49. Terminal Giri Adipura
50. Terminal Ir. Soekarno
51. Terminal Kebumen
52. Terminal Mangkang
53. Terminal Pekalongan
54. Terminal Induk Pemalang
55. Terminal Bulupitu Purwokerto
56. Terminal Mendolo
57. Terminal Bawen
58. Terminal Tidar
59. Terminal Tingkir
60. Terminal Tirtonadi
61. Terminal Jati
62. Terminal Bobot Sari
63. Terminal Tegal
64. Terminal Jepara
65. Terminal Giwangan
66. Terminal Dhaksinarga
67. Terminal Arjosari
68. Terminal Arya Wiraraja
69. Terminal Banyuwangga
70. Terminal Gayatri
71. Terminal Kertonegoro
72. Terminal Pacitan
73. Terminal Patria
74. Terminal Purboyo
75. Terminal Selo Aji
76. Terminal Tamanan
77. Terminal Tawangalun
78. Terminal Surodakan
79. Terminal Rajekwesi
80. Terminal Pandaan Pasuruan
81. Terminal Kambang Putih

82. Terminal Mengwi
83. Terminal Mandalika
84. Terminal Sumer Payung
85. Terminal Dara
86. Terminal Sei Ambawang
87. Terminal W.A. Gara
88. Terminal Gambut Barakat
89. Terminal Batu Ampar
90. Terminal Samarinda Seberang
91. Terminal Induk Lumpue
92. Terminal Latenri Sessu Pekkae
93. Terminal Petta Pongawai
94. Terminal Simbuang
95. Terminal Tipalayo
96. Terminal Kasintuwu
97. Terminal Mamboro
98. Terminal Boroko
99. Terminal Tangkoko
100. Terminal Puuwatu
101. Terminal Isimu
102. Terminal Duingi
103. Terminal Entrop
104. Terminal Entikong

Sehingga:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah TTA \& TB yang beroperasi} \\ & = \text{Jumlah TTA yang Beroperasi} + \text{Jumlah TB yang beroperasi} = 104 \end{aligned}$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Triwulan III Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{104}{104} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang dapat mendukung tercapainya kinerja kegiatan ini yaitu Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan Pagu Anggaran sebesar RP. 245.000.000,- dan realisasi keuangan per Triwulan III sebesar 204.570.600,- (83,50%).

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu menetapkan lokasi terminal tipe A dan terminal barang baru sesuai dengan skala prioritas berdasarkan hasil pengkajian lebih lanjut serta meningkatkan kegiatan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Barang.

IKK Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada triwulan III tahun 2021 sebesar 6 lokasi, jika dibandingkan dengan target PK triwulan III tahun 2021 sebesar 8 maka capaian kinerja mencapai 75%.

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada triwulan III tahun 2021 terdapat 6 lokasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada KSN dimana target tersebut sebenarnya telah terpenuhi pada tahun 2020, sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 telah sesuai dengan target renstra dan target PK Tahun 2021.

Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.

Berikut ini adalah daftar fasilitas pendukung dan integrasi moda yang sudah terbangun s.d Tahun 2021 berdasarkan realisasi PK pada Tahun 2021 dan hasil dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda serta Survey Inventarisasi dan Pendataan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan :

1. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang (TA. 2020)
2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo (TA. 2020)
3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta (TA. 2020)
4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten (TA. 2020)
5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga (TA. 2020)
6. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang (TA. 2020)

Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa antara realisasi dengan target masih masih belum terpenuhi karena adanya refocussing dan progress kegiatan per Triwulan III untuk Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD) masih sebesar 65% serta Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru (dilaksanakan oleh BPTD) sebesar 85% sehingga belum ada penambahan lokasi pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang baru.

Sehingga:

$$= \frac{\text{Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda}}{\text{Fasilitas Pendukung dan Integrasi moda yang sudah terbangun pada lokasi KSN Th 2020 s.d Th 2021}} = 6$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada triwulan III tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{6}{8} \times 100\% = 75\%$$

Kegiatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang dapat mendukung tercapainya kinerja kegiatan ini yaitu Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda serta Survey Inventarisasi dan Pendataan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan dengan total Pagu Anggaran sebesar RP. 582.528.000,- dan realisasi keuangan per Triwulan III sebesar 252.246.774,- (43,08%).

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu melakukan percepatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda pada lokasi yang sudah menjadi target pembangunan pada renstra dan meningkatkan kegiatan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda serta Survey Inventarisasi dan Pendataan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.

IKK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A pada triwulan III tahun 2021 sebesar 89,17%, jika dibandingkan dengan target PK triwulan III tahun 2021 sebesar 80,0% maka capaian kinerja mencapai 111,46%. Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pada Triwulan III sudah melebihi target pada PK Triwulan III.

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A pada triwulan III tahun 2021 yang diisi oleh koresponden pada satuan pelayanan Terminal Tipe A yang beroperasi, melalui aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperoleh hasil rekapitulasi rata-rata nilai IKM sebesar 89,17%.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, dari 104 Terminal Tipe A yang beroperasi, hanya 38 Terminal Tipe A yang melakukan survey IKM pada Bulan September 2021.

Sehingga:

$$\begin{aligned} & \text{Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A} \\ & = \text{Rekapitulasi hasil survey IKM pada Terminal Penumpang Tipe A} = 89,17\% \end{aligned}$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A pada triwulan III tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{80}{89,17} \times 100\% = 111,46\%$$

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu melakukan koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A agar secara rutin melakukan survey IKM dengan melakukan survey koresponden melalui Aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah disediakan dengan cara mengisi kuesioner melalui link dan scan QRcode yang telah disediakan. Diharapkan untuk kedepannya seluruh satpel Terminal Tipe A dapat melakukan survey koresponden secara rutin sehingga dapat mengetahui kondisi secara keseluruhan hasil dari survey IKM tersebut.

IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A pada triwulan III tahun 2021 sebesar 55,72%, jika dibandingkan dengan target PK triwulan III tahun 2021 sebesar 53,60% maka capaian kinerja mencapai 55,72%.

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan target Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A triwulan III tahun 2021 sebesar 53,60% dimana target tersebut sebenarnya telah terpenuhi pada tahun

2020, sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 telah sesuai dengan target renstra dan target PK Tahun 2021 yaitu sebesar 55,72%.

Kegiatan yang mendukung terlaksananya capaian kinerja ini meliputi Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Harjamukti (termasuk supervisi), Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Leuwipanjang (termasuk supervisi), Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Tirtonadi, Kota Surakarta (termasuk supervisi), Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Kebumen (termasuk supervisi) dan Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Angkutan Jalan.

Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Penumpang Tipe A adalah rata – rata dari persentase pemenuhan SPM pada Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Berdasarkan Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A mencakup:

- (1) Pelayanan Keselamatan;
- (2) Pelayanan Keamanan;
- (3) Pelayanan Keandalan/Keteraturan;
- (4) Pelayanan Kenyamanan;
- (5) Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan;
- (6) Pelayanan Kesetaraan.

Matriks Penilaian (SPM _{TN}) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:		
NO	ASPEK PENGUKURAN	NILAI (POINT)
ASPEK PELAYANAN KESELAMATAN (AP_{keselamatan})		
1	Lajur Pejalan Kaki Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan <i>crossing</i> dengan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Fasilitas Keselamatan Jalan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, penerangan jalan umum, pagar). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Jalur Evakuasi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Alat Pemadam Kebakaran Nilai 2 (dua) point apabila tersedia alat pemadam kebakaran. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
5	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas kesehatan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
6	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2

7	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
9	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEAMANAN (AP_{keamanan})		
1	Fasilitas pencegah tindak kriminal Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas pencegah tindak kriminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEANDALAN/KETERATURAN (AP_{keandalan})		
1	Ketersediaan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Keteraturan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
3	Ketersediaan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Keteraturan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
5	Ketersediaan Loket tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Loket tempat calon penumpang membeli tiket. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
6	Keteraturan Loket tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila Loket tempat calon penumpang membeli tiket teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	1

7	Ketersediaan Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai). Nilai 2 (dua) point apabila Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai) sesuai. Nilai 0 (nol) apabila tidak sesuai.	2
9	Ketersediaan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Keteraturan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
ASPEK PELAYANAN KENYAMANAN (AP_{kenyamanan})		
1	Ketersediaan tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak bersih.	2
3	Keteraturan di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
4	Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
5	Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
6	Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
7	Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2

8	Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Ketersediaan alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
11	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan Nilai 1 (satu) point apabila tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Kondisi ruang terbuka hijau, Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Ketersediaan Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
14	Ketersediaan Fasilitas dan petugas kebersihan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas dan petugas kebersihan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
15	Ketersediaan Tempat istirahat awak kendaraan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Tempat istirahat awak kendaraan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
16	Ketersediaan Area merokok (smoking area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area merokok (smoking area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
17	Ketersediaan Drainase yang memadai Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Drainase yang memadai. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
18	Ketersediaan Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
19	Ketersediaan Ruang baca (reading corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang baca (reading corner). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
20	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN (AP_{kemudahan})		
1	Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
2	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpisah.	1
3	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak	1

	terpenuhi.	
4	Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
5	Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
6	Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
7	Visual Informasi Pelayanan, antara lain : Denah/Layout terminal, Nomor trayek, nama PO dan Kelas Pelayanannya, Nama terminal keberangkatan, Jadwal, tarif dan Peta Jaringan. (Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di tuang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca) Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Audio informasi pelayanan, antara lain : informasi pelayanan dan Kejadian khusus dan gangguan. Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: Jenis angkutan, Lokasi angkutan, Jam pelayanan angkutan lanjutan, Jurusan/rute, Tarif. Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca. Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Informasi gangguan perjalanan mobil bus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
11	Ketersediaan Tempat penitipan barang Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Ketersediaan Fasilitas pengisian baterai (charging corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Aksesibilitas Tempat naik / turun penumpang Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
14	Ketersediaan Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
ASPEK PELAYANAN KESETARAAN (AP_{kesetaraan})		
1	Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
2	Ketersediaan Ruang ibu menyusui Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang ibu menyusui. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal		100

Sehingga:

$$SPM\ TTA = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

$$IKK_n = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$$

Note:

*Monitoring dilaksanakan pada saat Proses rehabilitasi selesai dilaksanakan pada tahun (n)

SPM TTA = Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (SP) pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe

A (TTA) yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

n = Jumlah Terminal yang beroperasi

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A pada triwulan III tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan hasil rekapitulasi rata-rata hasil persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A yg beroperasi yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{55,72}{53,60} \times 100\% = 103,96\%$$

Kegiatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang dapat mendukung tercapainya kinerja kegiatan ini yaitu Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Harjamukti (termasuk supervisi), Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Leuwipanjang (termasuk supervisi), Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Tirtonadi, Kota Surakarta (termasuk supervisi), dan Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Kebumen (termasuk supervisi), serta Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Angkutan Jalan dengan total Pagu Anggaran sebesar RP. 110.189.706.000,- dan realisasi keuangan per Triwulan III sebesar 53.819.122.012,- (48,84%).

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu melakukan percepatan kegiatan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sehingga hasil persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dapat meningkat.

IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada triwulan III tahun 2021 sebesar 71,78%, jika dibandingkan dengan target PK triwulan III tahun 2021 sebesar 71,03% maka capaian kinerja mencapai 101,06%. Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pada Triwulan III sudah melebihi target pada PK Triwulan III.

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada Triwulan III tahun 2021 diperoleh 71,78% dimana target tersebut sebenarnya telah terpenuhi pada tahun 2020, sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 telah sesuai dengan target renstra dan target PK Tahun 2021.

Sehingga:

$$\begin{aligned} \% \text{Penerapan Smart Terminal} &= \left[\frac{\text{Jumlah TTA Yang Melaporkan Operasional Secara Online}}{\text{Jumlah Terminal Sesuai SK Penetapan Lokasi TTA}} \times 87\% \right] + \\ &\left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 8,5\% \right] + \\ &\left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information, cctv}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 4,5\% \right] = \\ &\left[\frac{103}{126} \times 87\% \right] + \left[\frac{8}{103} \times 8,5\% \right] + \left[\frac{0}{126} \times 4,5\% \right] \\ &= 71,78\% \end{aligned}$$

Keterangan:

Penerapan Smart Terminal dibagi menjadi 3 bagian, antara lain :

1. Persentase dari Jumlah Terminal Tipe A Yang Melaporkan Operasional Secara Online dengan bobot 87%
2. Persentase dari Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate dengan bobot 8,5%
3. Persentase dari Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information dan CCTV dengan bobot 4,5%

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada Triwulan III tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{Capaian} = \frac{71,78}{71,03} \times 100\% = 101,06\%$$

Kegiatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang dapat mendukung tercapainya kinerja kegiatan ini yaitu Pengadaan Perangkat Terminal Online System dan Pembuatan Aplikasi Terminal Online System dengan total Pagu Anggaran sebesar RP. 20.000.000.000,- dan realisasi keuangan per Triwulan III sebesar 4.047.342.200,- (20,24%).

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu melakukan mengoptimalkan pelaporan operasional Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat secara online dengan memasang perangkat digitalisasi terminal, yaitu melalui percepatan kegiatan Terminal Operating System.

IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada triwulan III tahun 2021 sebesar 50%, jika dibandingkan dengan target PK triwulan III tahun 2021

sebesar 35% maka capaian kinerja mencapai 57,14%. Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pada Triwulan III belum sesuai target pada PK Triwulan III.

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah angkutan barang yang masuk ke UPPKB.

Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi:

- a. tata cara pemuatan barang;
- b. dimensi kendaraan Angkutan Barang;
- c. tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
- d. dokumen Angkutan Barang;
- e. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
- f. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Berdasarkan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada triwulan III tahun 2021 diperoleh 50%, sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 masih belum sesuai dengan target renstra dan target PK Tahun 2021.

Sehingga:

$$IKK = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah Kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\% = \frac{43.762}{86.847} \times 100\% = 50\%$$

*semakin rendah persentase pelanggaran, semakin baik, semakin tinggi persentase pelanggaran, semakin buruk

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Triwulan III tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{35 - (50 - 35)}{35} \times 100\% = 57,14\%$$

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini meliputi :

1. Pengawasan kendaraan angkutan barang di UPPKB dengan menggunakan aplikasi JTO (dilaksanakan oleh BPTD);
2. Kerjasama operasional UPPKB dengan pihak kedua;
3. Pengembangan dan integrasi sistem penimbangan kendaraan bermotor online (JTO);

4. Pengadaan perangkat keras sistem penimbangan kendaraan bermotor online (JTO);
5. Pengadaan weigh-in-motion (WIM);
6. Pelaksanaan sistem manajemen mutu UPPKB (ISO 9001:2015);
7. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan perbandingan antara target anggaran yang mendukung IKK Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp. 33.534.972.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.315.074.344,-, diperoleh capaian realisasi keuangan sebesar 45,67%.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu mewujudkan Indonesia bebas ODOL Tahun 2023 dengan cara melakukan pemasangan fasilitas pendukung sistem jembatan timbang *online*, pengembangan integrasi JTO dengan sistem *weight in motion*, E-Manifest, BLU-e, E-Tilang dan sistem ETLE milik Kepolisian.

IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada triwulan III tahun 2021 sebesar 83,84, jika dibandingkan dengan target PK triwulan III tahun 2021 sebesar 86 maka capaian kinerja mencapai 97,49%. Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pada Triwulan III belum sesuai target pada PK Triwulan III.

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada triwulan III tahun 2021 sebesar 83,84 merupakan hasil kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan menggunakan uraian bobot menyesuaikan dengan target Ditjen Perhubungan Darat. Salah satu bobot yang mempengaruhi yaitu tingkat penyerapan Anggaran Satuan Kerja dengan menyesuaikan realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2021 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Kegiatan yang termasuk dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis meliputi :

1. Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran, Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022;
2. Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana
3. Bimbingan teknis pelayanan, ketertiban, kenyamanan penumpang Tipe A
4. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
5. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor
6. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor
7. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi

8. Survey Rest Area pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
9. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan
10. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan
11. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta
12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan
13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri
14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi
15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022
16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan

Berdasarkan perbandingan antara target anggaran yang mendukung IKK peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar Rp. 23.256.341.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.208.700.640,-, diperoleh capaian realisasi keuangan sebesar 61,10%.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Triwulan III tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{83,84}{86} \times 100\% = 97,49\%$$

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu melakukan peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan dukungan teknis agar dapat mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan sesuai dengan target perjanjian kinerja dan rencana strategis serta dapat mendukung tercapainya program kegiatan sesuai dengan DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2021.

IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada triwulan III tahun 2021 sebesar 71, jika dibandingkan dengan target PK triwulan III tahun 2021 sebesar 71 maka capaian kinerja mencapai 100%. Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pada Triwulan III sudah sesuai target pada PK Triwulan III.

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada triwulan III tahun 2021 sebesar 71 merupakan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyesuaikan dengan target Setditjen Perhubungan Darat. Kegiatan yang termasuk dalam Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, yaitu kegiatan layanan perkantoran.

Berdasarkan perbandingan antara target anggaran yang mendukung IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar Rp.6.355.584.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.741.511.044,-, diperoleh capaian realisasi keuangan sebesar 58,87%.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Triwulan III tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{71}{71} \times 100\% = 100\%$$

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu melakukan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan layanan perkantoran serta melakukan optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan target rencana penarikan dana yang ada.

Bab III

Penutup

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Beberapa poin yang dapat disampaikan pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan III Tahun 2021 ini terdapat 9 (Lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan triwulan II tahun 2021. Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada triwulan III tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terealisasi 0,61 (target tahun 2021 sebesar 0,61), dengan capaian kinerja sebesar 100%;
 - b. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi terealisasi sebesar 104 lokasi (target tahun 2021 sebesar 104 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar 100%;
 - c. Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda terealisasi sebesar 6 lokasi (target tahun 2021 sebesar 8 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar 75%;
 - d. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A terealisasi sebesar 89,17 (target tahun 2021 sebesar 80,0) dengan Capaian Kinerja sebesar 111,46%;
 - e. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A terealisasi sebesar 55,72 % (target tahun 2021 sebesar 53,60 %), dengan capaian kinerja sebesar 103,96%;

- f. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A terealisasi 71,78 % (target tahun 2021 sebesar 71,03%), dengan capaian kinerja sebesar 101,06%;
 - g. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terealisasi sebesar 50% (target tahun 2021 sebesar 35%), dengan capaian kinerja sebesar 57,14%;
 - h. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi sebesar 83,84 (target tahun 2021 sebesar 86), dengan capaian kinerja sebesar 97,49%;
 - i. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terealisasi 71 (target tahun 2021 sebesar 71), dengan capaian kinerja sebesar 100%;
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut :
- a. Monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - b. Melakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka penyerapan realisasi anggaran;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. Memaksimalkan peran SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi demi tercapainya target capaian kinerja Tahun 2021.
 - e. Perlu dilakukan revisi Perjanjian Kinerja menyesuaikan dengan revisi DIPA/ POK Tahun 2021